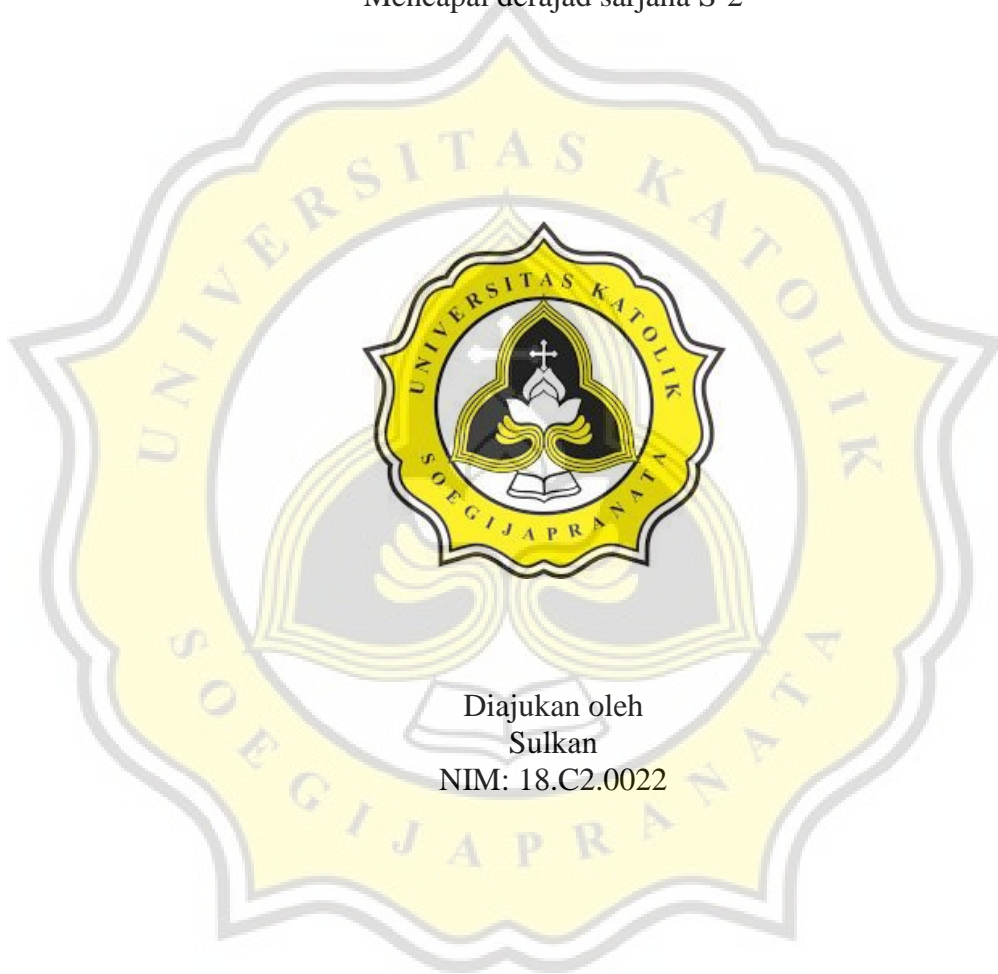


**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI PELATIHAN
KESEHATAN (BAPELKES) SEMARANG DALAM PEMENUHAN HAK
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI
DI BIDANG KESEHATAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2



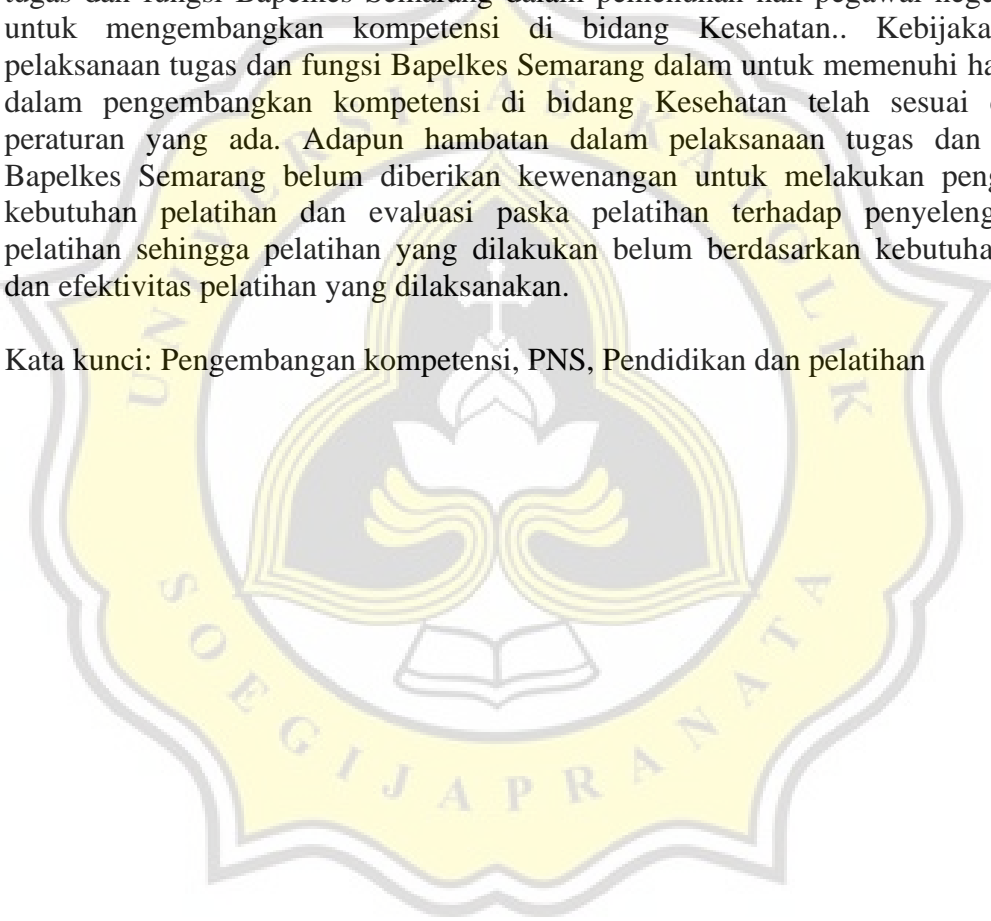
Diajukan oleh
Sulkan
NIM: 18.C2.0022

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
TAHUN 2023

ABSTRAK

Pengembangan kompetensi merupakan hak pegawai negeri sipil (PNS), pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. setiap penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelkes Semarang dalam pemenuhan hak pegawai negeri sipil untuk mengembangkan kompetensi di bidang Kesehatan.. Kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelkes Semarang dalam untuk memenuhi hak PNS dalam pengembangan kompetensi di bidang Kesehatan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelkes Semarang belum diberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian kebutuhan pelatihan dan evaluasi paska pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan sehingga pelatihan yang dilakukan belum berdasarkan kebutuhan PNS dan efektivitas pelatihan yang dilaksanakan.

Kata kunci: Pengembangan kompetensi, PNS, Pendidikan dan pelatihan



ABSTRACT

Competency development is the right of civil servants (PNS), basically aimed at ensuring and maintaining the ability of employees so that they meet the required qualifications so that they can make an optimal contribution to the organization. One form of employee development is education and training. every training organization must be accredited and carried out by an accredited organizing institution. This sociological juridical research was carried out to describe the implementation of the duties and functions of Bapelkes Semarang in fulfilling the rights of civil servants to develop competence in the health sector. The policies and implementation of the duties and functions of Bapelkes Semarang in fulfilling the rights of civil servants in developing competencies in the health sector are in accordance with regulations. which exists. The obstacles in carrying out the duties and functions of Bapelkes Semarang have not been given the authority to carry out training needs assessments and post-training evaluations of the implementation of training so that the training conducted has not been based on the needs of civil servants and the effectiveness of the training carried out.

Keywords: Competency development, PNS, Education and training

